
PRINSIP MA'AT: LANDASAN MORAL DAN LEGITIMASI KEKUASAAN FIR'AUN DI MESIR KUNO

Naratas Carita Alexsandri

Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: ncalexsandri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran prinsip Ma'at sebagai instrumen dasar dalam pembentukan sistem hukum dan legitimasi politik di peradaban Mesir Kuno. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan studi dokumen, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep Ma'at yang melambangkan kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekacauan (Isfet). Temuan menunjukkan bahwa Ma'at tidak hanya menjadi fondasi moral bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber otoritas absolut bagi Fir'aun sebagai "Tuan Ma'at" yang bertanggung jawab menjaga harmoni antara dunia manusia dan tatanan ilahi. Integrasi antara hukum sipil dan keadilan eskatologis (akhirat) melalui ritual "Penimbangan Hati" memperkuat kepatuhan sosial yang membuat peradaban Mesir mampu mempertahankan stabilitasnya selama ribuan tahun.

KATA KUNCI:

Ma'at, Fir'aun, Mesir Kuno, Legitimasi Politik, Hukum

PENDAHULUAN

Mesir merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika dan dikenal sebagai salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah ini telah menjadi pusat lahirnya berbagai kemajuan dalam bidang budaya, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Awal mula berkembangnya peradaban Mesir tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Lembah Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya.

Sungai Nil berperan sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Mesir kuno. Aliran sungai ini menyediakan air, tanah yang subur untuk pertanian, serta jalur transportasi yang mendukung aktivitas perdagangan dan interaksi antarwilayah. Karena peran besarnya tersebut, Sungai Nil dapat disebut sebagai kakek buyut peradaban manusia (Cahyono, 2023). Namun, kelangsungan peradaban ini tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh sistem nilai

yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Di sinilah peranan *Ma'at* hadir sebagai dasar moral, kebenaran, dan keadilan yang mempertahankan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Dalam struktur kepercayaan mereka, *Ma'at* kemudian dicitrakan sebagai sosok dewi yang melambangkan kebenaran, keadilan, dan aturan moral universal. Dewi *Ma'at* digambarkan sebagai figur yang membawa stabilitas, bukan hanya bagi dunia manusia, tetapi juga bagi peredaran bintang dan pergantian musim. Hal ini menunjukkan bahwa bagi bangsa Mesir, hukum tidak dipandang sebagai beban atau batasan, melainkan sebagai anugerah suci yang memungkinkan kehidupan tetap berlangsung di tengah lingkungan padang pasir yang keras.

Lebih jauh lagi, prinsip *Ma'at* ini menjadi fondasi utama bagi legitimasi kekuasaan politik para penguasa Mesir. Fir'aun tidak hanya bertindak sebagai pemimpin administratif, tetapi juga memegang gelar sebagai "Tuan *Ma'at*" yang memiliki tugas sakral untuk menegakkan keadilan di seluruh wilayah kekuasaannya (Awaluddin et al., 2026). Keberhasilan seorang Fir'aun dalam kepemimpinan tidak lagi dinilai hanya dari perluasan wilayah militer atau penumpukan harta, tetapi lebih kepada kemampuannya untuk mewujudkan keadilan *Ma'at* dalam menjaga ketenangan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Kajian mengenai peradaban Mesir Kuno telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dengan berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Awaluddin (2026), telah membedah eksistensi sistem hukum Mesir Kuno secara umum sebagai instrumen keteraturan sosial. Di sisi lain, kajian dari Fitriani & Nabila (2023) lebih menitikberatkan pada aspek religi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat Nil terhadap kehidupan pasca kematian. Selain itu, Cahyono (2023) juga memberikan tinjauan mengenai bagaimana faktor geografis Sungai Nil membentuk pola kebudayaan masyarakat Mesir purba.

Namun, meskipun tema Mesir Kuno telah banyak dibahas, masih terdapat celah (gap) dalam literatur mengenai bagaimana prinsip moral *Ma'at* secara spesifik dikonstruksi sebagai alat legitimasi politik yang mengikat otoritas absolut Firaun. Pembahasan mendalam dari artikel ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan stabilitas kosmik *Ma'at* dengan legitimasi fisik penguasa, di mana

Firaun tidak hanya dipandang sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjamin harmoni alam semesta.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran prinsip *Ma'at* sebagai landasan moral dan instrumen legitimasi kekuasaan Firaun. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dialektika antara agama, hukum, dan kekuasaan dalam peradaban kuno yang masih relevan sebagai materi pengayaan dalam ilmu sejarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi dokumen atau *literature review*. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip *Ma'at* sebagai dasar moral dan hukum dalam peradaban Mesir Kuno. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2003), metodologi sejarah mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan sumber (heuristik). Dalam proses ini, peneliti menelusuri berbagai sumber sekunder yang memiliki kredibilitas, seperti jurnal internasional, buku tentang sejarah peradaban kuno, serta artikel ilmiah yang membahas aspek sosial dan hukum di Mesir. Setelah itu, dilakukan verifikasi atau kritik terhadap sumber untuk menyeleksi data yang paling tepat dan relevan. Tahap ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembahasan mengenai simbolisme dewi *Ma'at* dan konsep *Isfet* didasarkan pada kerangka teori yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap akhir, data yang telah melalui proses verifikasi kemudian diinterpretasikan. Peneliti melakukan analisis kualitatif untuk memahami bagaimana nilai-nilai *Ma'at* berfungsi secara nyata sebagai penyeimbang atau “penawar” terhadap kekacauan (*Isfet*) dalam kehidupan sosial dan etika masyarakat. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara terstruktur dalam bentuk historiografi, dengan tujuan menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran *Ma'at* dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam peradaban Mesir Kuno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu *Ma'at* ? *Ma'at* merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan moral, etika, dan hukum bagi peradaban Mesir Kuno. Sebagai sebuah landasan hukum *Ma'at*, disimbolkan kebenaran, ketertiban, dan keadilan, sering digambarkan sebagai Dewi *Taher-Ma'at* digambarkan sebagai sosok perempuan yang duduk atau berdiri, kepalanya dihiasi bulu, memegang tongkat kerajaan di satu tangan dan ankh di tangan lainnya, atau memegang bulu simbol tesh. Ia juga dikenal sebagai *The Feather of Truth* (Abd El-Hamied, 2024; Schroeder, 2015).

Penggunaan simbol dewi yang memiliki atribut bulu menunjukkan bahwa hukum di Mesir Kuno tidak hanya difokuskan pada hukuman, tetapi juga memiliki aspek kelembutan dan integritas moral. Simbol ini bertindak sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa setiap tindakan hukum membawa konsekuensi moral yang perlu dipertimbangkan, sehingga mendorong kepatuhan yang muncul dari rasa hormat terhadap kebenaran, alih-alih hanya karena takut pada hukuman. *Ma'at* adalah konsep sentral yang menjadi fondasi tidak hanya yurisprudensi, tetapi juga etika, moralitas, dan tatanan kosmik Mesir Kuno (Assmann, 2002 dalam Awaluddin et al., 2026)

Terlihat jelas pada perbandingan jika hukum Mesir Kuno didasarkan pada prinsip *Ma'at*, yaitu menciptakan keadilan, kebenaran, dan harmoni kosmik. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, di mana para pendeta sering bertindak sebagai hakim. Hukum ini berbeda dari hukum Babilonia, yang lebih berorientasi pada sanksi dan aturan tertulis. Mesir Kuno memberikan contoh unik tentang bagaimana hukum dapat diintegrasikan dengan kepercayaan dan praktik spiritual (Irawan et al., 2025).

Ma'at adalah pusat utama yang menyatukan seluruh dimensi kehidupan dalam peradaban Mesir Kuno, mulai dari keteraturan alam semesta, norma-norma etika, hingga pengakuan politik yang tertinggi. *Ma'at* bukan hanya sebuah ide hukum yang tidak nyata, tetapi merupakan tolak ukur kebenaran hidup yang menuntut setiap individu, terutama Fir'aun, untuk mempertahankan keseimbangan alam. Jika dilihat dari sudut pandang politik, *Ma'at* berfungsi sebagai sarana untuk memberikan legitimasi yang mengubah kekuasaan absolut Firaun menjadi kewenangan moral yang diakui. Dengan berperan sebagai pelindung *Ma'at*, Firaun memperoleh ketaatan dari rakyatnya bukan melalui sanksi seperti yang terdapat dalam tradisi Babilonia, tetapi melalui keyakinan spiritual yang menyatakan bahwa ketertiban dunia tergantung pada integritas sang penguasa.

Konsep *Ma'at* sebagai Legitimasi Fir'aun

Konsep *Ma'at* yang tercipta adalah sebagai obat dari adanya *Isfet* (kekacauan), Keteraturan disebut *Ma'at* sedangkan kekacauan disebut *Isfet* (encyclopedia, n.d.). *Isfet* adalah hal yang sebisa mungkin dihindari oleh masyarakat Mesir kuno. Adanya *Ma'at* dan *Isfet* menggambarkan suatu konstruksi filosofi hukum yang bersifat pencegahan dan ideologis. Dengan menganggap *Isfet* sebagai ancaman utama bagi keberadaan kosmos, masyarakat Mesir Kuno tidak hanya melihat pelanggaran hukum sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan alam semesta.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai norma yang bertujuan untuk menghindari kekacauan sejak awal. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum menjadi elemen penting dalam usaha mempertahankan stabilitas kosmik yang diyakini menjadi dasar kehidupan. Pemikiran ini memberikan kesempatan bagi otoritas Mesir, terutama lembaga kerajaan, untuk menanamkan legitimasi yang kuat terhadap sistem hukum yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun Mentuhotep II, berupaya meligitimasi pemerintahannya dengan cara yang mengingatkan kembali pada kerajaan lama lebih dari seratus tahun sebelumnya. (Ibid : 139 dalam Jost, 2021). Ini menunjukkan kestabilan pemerintahannya dan mematuhi hukum *ma'at*.

Fir'aun adalah tonggak utama dalam pandangan masyarakat Mesir Kuno sebagai pelaksana aturan *Ma'at* sehingga mereka menganggap bahwa Fir'aun yang berkuasa adalah bagian dari dewa yang selalu mereka sembah. Seorang Firaun akan menerima status ilahi ini pada saat penobatannya. (Tyldesley, Hatchepsut : 134 dalam Jost, 2021). Namun, status ini membawa konsekuensi besar bagi jalannya pemerintahan karena tindakan dan kepatuhannya terhadap sistem *ma'at* akan menentukan apakah pemerintahannya bersifat ilahi atau tidak. Diberi sanksi atau dikutuk. Jika seorang Firaun menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyenangkan para dewa.(ayah ilahinya), maka Mesir akan makmur (Jost, 2021).

Sejalan dengan pandangan masyarakat yaitu pusat dari kepercayaan dan kehidupan politik Mesir kuno ialah Fir'aun atau raja penguasa Mesir. Rakyat Mesir kuno menganggap bahwa Fir'aun adalah Dewa Horus (anak dari Dewa Osiris) yang pada akhirnya nanti akan menyatu dengan Dewa Osiris setelah ia mati (Fitriani & Nabila, 2023). Kerajaan Lama adalah era yang bergantung pada otoritas ilahi dan di mana "kultus

raja" didirikan; dari pola inilah fir'aun – fir'aun dari dinasti sebelumnya akan meniru untuk menciptakan gagasan fir'aun yang berkelanjutan (Jost, 2021). Dengan demikian, status Fir'aun sebagai perwujudan ilahi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menentukan bagaimana setiap kondisi yang dialaminya dipahami sebagai bagian dari tatanan kosmik. Bahkan kondisi kesehatannya, memiliki makna kosmologis yang lebih luas.

Dalam sebuah penelitian yang berfokus pada kesehatan, studi tersebut menyatakan bahwa pada kepercayaan Mesir Kuno masyarakat cenderung mempercayai bahwa sehatnya penguasa mereka kala itu adalah sebagai perwujudan akan terlaksananya kebaikan serta kebenaran mereka di dunia. Fir'aun adalah penjaga dan juga perwujudan dari prinsip *Ma'at*, sehingga kesehatan dan kesejahteraannya terkait erat dengan stabilitas serta keteraturan alam semesta. Penyakit yang menimpa penguasa diartikan sebagai tanda adanya gangguan pada keseimbangan kosmik tersebut seperti pada terlaksananya *Isfet*. Sehingga memaknai kesehatan penguasa dalam konteks ini Fir'aun, bukan lagi soal urusan pribadi tapi menjadi gambaran apabila ketidakbenaran sedang menimpa mereka di dunia.

Ilustrasi yang mencolok adalah bahwa penyakit pada seorang penguasa diyakini mengancam atau mencerminkan gangguan terhadap *Ma'at*. sebuah masalah yang menjadi perhatian negara, karena kesejahteraan Fir'aun terkait dengan stabilitas kosmik (Elendu, 2024; Gonzalez & Gonzalez, 2021; Hammad, 2018 dalam Popshetwar Santhosh Kumar et.al, 2024). Dalam Kosmologi Mesir Kuno melihat keadaan fisik Fir'aun bukan hanya sebagai suatu kejadian pribadi, tetapi sebagai simbol dari kondisi tatanan kosmik yang lebih besar.

Semua Fir'aun Mesir ditugaskan untuk membangun, mewujudkan, memelihara, dan melindungi *Ma'at*. Keberhasilan pemerintahan mereka bergantung pada hal ini. Sebaliknya, ketika Fir'aun dan penguasa gagal memenuhi tugas mereka, ketertiban dan stabilitas hilang, dan otoritas pusat terpecah dan terfragmentasi, *Ma'at* direbut dan menjadi tidak berfungsi oleh kekuatan agresif *Isfet* (Olgun, 2018). Fir'aun adalah sumber tertinggi hukum dan kekuasaan di Mesir Kuno. Keputusannya dianggap sebagai perintah ilahi yang mencerminkan kehendak para dewa. Para Fir'aun mengeluarkan undang-undang, menunjuk hakim, dan mengawasi urusan hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Fir'aun bukan sekadar figur simbolis yang jauh ia terlibat secara aktif dalam administrasi keadilan. Dekrit kerajaan dikeluarkan untuk menangani masalah hukum tertentu, seperti sengketa tanah, tindak pidana, dan isu-isu sosial. Wazir, pejabat tertinggi di bawah Fir'aun, dipercayakan dengan tanggung jawab mengelola sistem hukum. Wazir bertindak sebagai hakim utama dan mengawasi kerja pengadilan lokal, memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan *Ma'at*. Tampaknya raja, wazir (yang memenuhi peran sebagai "perdana menteri" dalam terminologi modern kita) dan pengadilan besar yang terletak di Memphis memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap negara. Raja adalah kepala administrasi peradilan, tetapi sayangnya tidak ada bukti yang tersisa dari Kerajaan Lama yang menunjukkan bahwa raja dapat mendengar dan memutuskan kasus sendiri. Sumber hukum eksplisit dari Kerajaan Lama jarang ditemukan, meskipun terdapat banyak bukti tidak langsung berupa gelar dan referensi terhadap lembaga atau situasi hukum. (Cf Muhs 2016: 25; Jasnow 2003c: 93 dalam van Blerk, 2018).

Berbeda dengan adanya prasasti dari Zaman Kerajaan Baru di mana menggambarkan raja memimpin persidangan, di mana ia mendengarkan permohonan dan menjatuhkan putusan yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (World History Edu, 2025). Kerajaan Baru memiliki kumpulan teks hukum yang lebih banyak dan lebih beragam daripada Kerajaan Lama dan Kerajaan Tengah. Meskipun tidak menghasilkan kode hukum, dekrit kerajaan yang terperinci seperti Dekrit Nauri, bersama dengan kemungkinan referensi ke koleksi hukum sistematis, ada (Jasnow 2003c: 93 dalam van Blerk, 2018) . Misalnya, dalam Dekrit Horemheb, Raja menyatakan: "Aku telah memberi mereka (para hakim) instruksi lisan dan hukum dalam buku-buku mereka" dan dalam Papyrus Bulaq 10, misalnya, satu pihak mengutip "hukum firaun" sebagai preseden dan dalam Papyrus Turin 2021 seorang pria memperkenalkan hukum dengan kata-kata berikut: "Raja berkata ..." (Ibid dalam van Blerk, 2018).

Fir'aun bukan hanya penegakan hukum akan tetapi dipandang sebagai penyambung harmoni antara manusia, alam, dan tatanan ilahi. Dalam konteks ini, setiap pelanggaran dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan dunia, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mematuhi norma yang berlaku. Hukum tidak berfungsi secara independen tetapi terikat secara intrinsik pada prinsip *Ma'at* (kebenaran dan keadilan), sehingga pelanggaran hukum negara memiliki implikasi langsung terhadap

takdir spiritual seseorang di akhirat (Leszczyński, 2020; Loktionov & Alexandrova, 2025 dalam (Jock & Kingsley, 2025).

Hukum yang berlandaskan pada *Ma'at* menyimpan sisi historis yang membangun kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. *Ma'at* juga adalah takdir bagi mereka yang sudah mati dalam menghadapi hari penimbangan hati. Di sinilah *Ma'at* menumbuhkan kesadaran masyarakatnya akan kepatuhan kepada norma hukum itu sendiri. Dalam pemahaman ini, hati seseorang akan diukur beratnya dengan bulu *Ma'at*, yang melambangkan kebenaran dan keadilan.

Orang Mesir kuno optimis tentang kehidupan setelah kematian dan, hingga akhir Kerajaan Lama, kebahagiaan di akhirat hanya diperuntukkan bagi raja, pemimpin, dan orang-orang kaya serta berpengaruh yang memiliki hak istimewa di Mesir kuno (Jock & Kingsley, 2025). Puncak penegakan *Ma'at* dan konsep keadilan eskatologis tercermin dalam ritual Penimbangan Hati (*Weighing of the Heart*) yang berlangsung di alam baka. Dalam ritual ini, jantung almarhum (yang dianggap sebagai wadah kebijaksanaan dan moralitas) ditimbang melawan Bulu *Ma'at*, simbol kebenaran dan tatanan kosmik, di hadapan dewa Osiris dan para hakim ilahi (Hornung, 1999 dalam (Awaluddin et al., 2026).

Jika hati tersebut ringan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut hidup sesuai dengan nilai-nilai *Ma'at*, seperti kejujuran, keadilan, dan keteraturan. Sebaliknya, jika hati berat, itu menunjukkan adanya pelanggaran moral, yang dapat membawa pada kegagalan untuk mendapatkan kehidupan abadi. Dari sini dapat dilihat bahwa prinsip *Ma'at* tidak bisa dipahami sebagai hukum yang berdiri sendiri atau terpisah. Justru, *Ma'at* menjadi sumber nilai yang mendasari seluruh sistem hukum, moral, dan pandangan mengenai kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, hubungan antara *Ma'at*, hukum, dan kehidupan setelah mati menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling memperkuat. Penegakan hukum di dunia berfungsi sebagai langkah awal untuk menjaga tatanan, sementara penilaian di akhirat menjadi legitimasi tertinggi untuk kebenaran tersebut.

Disisi lain, masyarakat percaya bahwa untuk menjaga keharmonisan kosmik, manusia harus ikut serta secara aktif melalui berbagai tindakan simbolis dan upacara. Dengan demikian, praktik keagamaan berperan penting dalam menegaskan dedikasi terhadap nilai-nilai *Ma'at* sekaligus menjaga keseimbangan antara dunia manusia, alam,

serta tatanan ilahi. Dalam hal ini, ritual bukan hanya sekadar ungkapan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai norma yang memperkuat keteraturan sosial dan kosmik. Ritual-ritual yang dipersembahkan kepada *Ma'at* dilakukan untuk memohon restu-Nya dan menjaga keseimbangan alam semesta. Ritual-ritual tersebut meliputi: mempersembahkan doa dan kurban kepada *Ma'at*; berpartisipasi dalam upacara-upacara yang memperkuat tatanan sosial dan kosmis; serta mengucapkan 'Pengakuan Negatif' selama proses penghakiman, sehingga menegaskan ketaatan seseorang kepada *Ma'at* (Dabney, 2025).

Penilaian di akhirat menjadi legitimasi tertinggi bagi kebenaran di dunia. Namun, ketika memasuki Periode Akhir (sekitar 664–332 SM) dan selama pemerintahan Ptolemaik, filsafat moral Mesir mulai berinteraksi dengan pemikiran Yunani. Bangsa Yunani, yang dipengaruhi oleh budaya Mesir, memasukkan unsur-unsur *Ma'at* ke dalam kerangka etika mereka sendiri. Sebaliknya, etika Mesir menyerap aspek-aspek filsafat Yunani, yang mengarah pada sintesis ide (Thompson, 2012 dalam (Macpherson, 2025)). Hal ini menunjukkan bahwa *Ma'at* memiliki fleksibilitas dan daya tahan yang luar biasa melampaui batas zaman dan budaya.

Praktik-praktik ritual yang ditujukan kepada *Ma'at* menunjukkan bahwa gagasan ini tidak hanya berada dalam ranah ideologi atau filosofi, tetapi juga terwujud secara nyata dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Mesir Kuno. Melalui doa, pengorbanan, keterlibatan dalam upacara, hingga pengucapan 'Pengakuan Negatif' saat penghakiman, masyarakat menegaskan secara aktif dedikasi mereka terhadap nilai-nilai keteraturan, keadilan, dan keseimbangan terhadap *Ma'at*.

Dalam perspektif yang lebih luas, pelestarian ritual semacam ini dapat dipahami melalui konsep narasi Afronografis adalah narasi Afrosentris yang terdiri dari cerita-cerita budaya (auto/biografi, fiksi, puisi) atau bentuk-bentuk penceritaan dari berbagai modalitas (digital, lirik, lisan, visual) yang digunakan untuk menggeser narasi terkini tentang orang Afrika menuju agensi, keselarasan dengan *Maat* (Tuhan) melalui penciptaan atau pelestarian ritual, dan pembebasan melalui penguatan. Ini adalah narasi kemenangan karena merupakan hasil dari praktik Afrosentris yang membangun fondasi bagi apa yang dibutuhkan untuk tujuan dan keberhasilan orang Afrika yang dibebaskan dari konsepsi Eurosentris tentang apa yang dianggap sebagai norma, standar, atau realitas. Seperti yang dinyatakan McDougal, 2014 dalam Clarkson, 2024), "kesadaran

kemenangan mengacu pada pengetahuan dan kesadaran bahwa orang Afrika telah menang di masa lalu dan akan menang di masa depan.” (Clarkson, 2024)

Hal ini menegaskan bahwa *Ma'at* berperan sebagai landasan yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, keberlanjutan peradaban Mesir Kuno tidak hanya didukung oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kesadaran bersama untuk terus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan tatanan ilahi melalui praktik-praktik yang berakar pada prinsip *Ma'at*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peradaban Mesir Kuno dibentuk dengan landasan nilai *Ma'at* yang menggabungkan elemen hukum, moral, dan spiritual dalam satu kesatuan. *Ma'at* bukan sekadar pemikiran filosofis yang pasif, tetapi merupakan alat praktis yang berfungsi sebagai "penawar" untuk meredam kekacauan (*Isfet*) serta memastikan kelangsungan kosmos. Hubungan yang saling terkait antara keteraturan dan kekacauan inilah yang menanamkan ajaran bahwa ketaatan hukum adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni antara manusia, lingkungan, dan dewa. Keberadaan dan pengakuan politik Fir'aun sebagai penguasa yang mutlak sangat tergantung pada kemampuannya untuk mewujudkan prinsip *Ma'at* dalam kepemimpinannya.

Sebagai "Penguasa *Ma'at*" dan representasi Dewa Horus, Fir'aun memiliki mandat sakral untuk menegakkan keadilan melalui struktur birokrasi yang teratur, termasuk peran Wazir dan pengeluaran keputusan kerajaan. Dengan demikian, keberhasilan seorang penguasa tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari stabilitas kosmik dan kesejahteraan rakyat yang mampu ia pertahankan. Di samping itu, penggabungan antara hukum dunia dan keadilan eskatologis melalui ritual "Penimbangan Hati" menciptakan sistem pengawasan sosial yang mandiri berdasarkan kesadaran teologis masyarakat. Keyakinan bahwa setiap tindakan akan diakui di hadapan Bulu *Ma'at* di akhirat menjadikan patuhan terhadap norma hukum sebagai suatu kebutuhan spiritual, bukan sekadar rasa takut akan hukuman fisik. Pada akhirnya, kolaborasi antara otoritas politik Fir'aun dan kesadaran moral yang berlandaskan pada *Ma'at* inilah yang menjadi kunci utama bagi ketahanan dan persatuan nasional peradaban Mesir Kuno di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Hamied, M. E. (2024). A Contemporary Vision of Painting Inspired by The Laws of Religion in Ancient Egypt. رؤية تصويرية معاصرة مستوحاة من فلسفة التعاليم الدينية عند المصري القديم. *Pharos International Journal of Arts and Design*, 1(1). https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.
- Awaluddin, A., Fatihin, C., & Firmanto, T. (2026). Dari Ma'at Ke Legitimasi Kekuasaan: Sejarah Dan Eksistensi Sistem Hukum Mesir Kuno Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2815–2824. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i>
- Cahyono, A. (2023). Sungai Nil dan Kehidupan Masyarakat Mesir: Tinjauan Historis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 124–130. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Clarkson, O. J. (2024). *The Afronographic Narrative: A Literary Practice Of Cultural Identity And The Preservation Of Ma'at* [Dissertation, Temple University Graduate Board]. <https://scholarshare.temple.edu/server/api/core/bitstreams/fdee4425-fef2-4f19-9568-0918748503a7/content>
- Dabney, S. (2025, April 16). *The Cosmic Balance: How Ma'at Influenced Governance in Ancient Egypt*. Egyptmythology Retrieved March 25, 2026, From. <https://egyptmythology.com/the-cosmic-balance-how-maat-influenced-governance-in-ancient-egypt>
- encyclopedia. (n.d.). "Maat" Arts and Humanities Through the Eras. Encyclopedia.Com. Retrieved March 25, 2026, from <https://www.encyclopedia.com/humanities/culture-magazines/maat>
- Fitriani, & Nabila, A. (2023). Historitas Agama Mesir Kuno Dalam Perspektif A-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 629–641. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i3.3295>
- Irawan, C., Utami, R. A., Rahmasari, H., Kosasih, A., Nasistiawan, J., Wafiya, W., & Putra, D. A. (2025). *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)*. (edisi keempat). Anggota IKAPI: 027/Anggota Luar Biasa/SBA/21YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/>
- Jock, A. M., & Kingsley, K. N. (2025). Judgment and Afterlife in Ancient Egypt: The Principle of Ma'at, Osirian Tradition, and the Comparative Context of Eternal

- Punishment. *Journal of Contemporary Rituals and Traditions*, 3(1), 39–58.
<https://doi.org/10.15575/jcrt.718>
- Jost, S. (2021). *Female Pharaohs and Divine Advocacy* [Thesis, Lindenwood University].
<https://digitalcommons.lindenwood.edu/theses>
- Macpherson, R. (2025). The Intersection of Ancient and Non-Western Moral Philosophies with Contemporary Western Theories of Educative Leadership. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 8(9), 13–24. <https://www.ijlrhss.com/paper/volume-8-issue-9/2-HSS-3177.pdf>
- Olgun, H. (2018). Hz. Musa'nın Yüzleştiği Statüko: Kadim Mısır'ın Ma'at Doktrini. *Milel ve Nihal inanç-kültür-mitoloji*, 15(2), 149–169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17131/milel.505037>
- Popshetwar Santhosh Kumar et.al. (2024). From Ma'at to Panchamahabhutas: Unpacking the Conceptual Foundations of Healing in Ancient Egyptian and Indian Traditions. *Low-Area and Low-Power Threshold Implementation Design Technique for AES S-Box, Excel International Journal of Technology, Engineering and Management*, 4(12), 66–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.64971/j.cph.ijsdip.v13.i4.9.2025>
- Schroeder, T. M. (2015). Ma'at as a Theme in Ancient Egyptian Tomb Art. In *Oglethorpe Journal of Undergraduate Research* (Vol. 5, Number 1). Available at:
<https://digitalcommons.kennesaw.edu/ojur/vol5/iss1/1>
- van Blerk, N. (2018). The emergence of law in ancient Egypt: The role of Maat. *Fundamina*, 24(1), 60–88. <https://doi.org/10.17159/2411-7870/2018/v24n1a4>
- World History Edu. (2025, April 3). *The Law in Ancient Egypt*. Worldhistoryedu.Com Retrieved March 25, 2026, From. <https://worldhistoryedu.com/the-law-in-ancient-egypt>.